



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIZAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 653788

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **777.000.000**

1. Tanah Seluas 166.5 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121.5 m2/93.5 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1294.8 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **382.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UY 125 S AT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 28D (AL 115S/MIO) Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AGYA1.2GA/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 161.086.932

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.320.086.932

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.320.086.932

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.